

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO(SITARO)
(Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro)**

Oleh: Vivi Noviani Kendung¹

ABSTRAK

Sampah sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, yang masih bermasalah terkait dengan pengelolaannya yang dianggap tidak efektif. Indicator yang digunakan adalah teori George C. Edward III tentang empat pilar utama dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu: Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi, Komunikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dari sisi birokrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak memiliki struktur yang panjang, namun masih terdapat kekurangan engenai bagian-bagian khusus terkait dengan bidang yang menangani sampah. Dari sisi sumber daya manusia juga masih terdapat kekurangan disamping sarana dan prasarana penunjang. Dari sisi disposisi terkait komitmen aparat sebenarnya sudah baik namun masih sering terjadi kelalaian, sedangkan terkait komunikasi masih kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan. Masalah-masalah tersebut di perparah dengan tidak adanya perda yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, terkait dengan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

ABSTRACT

Waste as a result of various activities in human life or as a result of a natural process, which often causes serious problems in various cities in the world. The problem of waste in various urban areas does not only threaten the beauty and cleanliness aspects of the city, but will also have a negative impact on environmental preservation and public health if not handled properly. In Law Number 18 of 2008 concerning waste management, waste management is an activity that is regulated both comprehensively and continuously which includes waste reduction and handling aimed at improving public health and environmental quality benefits as well as turning waste into a resource. This research was conducted to see and determine the implementation of waste management policies, especially by the Department of Environment and Land in Sitaro District, which are still having problems related to their ineffective management. The indicator used is the theory of George C. Edward III regarding the four main pillars in assessing policy implementation, namely: Bureaucratic

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Structure, Resources, Disposition, Communication. The results showed that in general, it has been functioning and realized, although the results have not been fully effective. From the bureaucratic side, the Department of Environment and Land does not actually have a long structure, but there are still shortcomings regarding special sections related to the field that deals with waste. In terms of human resources, there are still deficiencies in addition to supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition regarding the commitment of the apparatus, it is actually good but there are still frequent negligence, while the communication is still less intensive and there is a lack of enthusiasm for the community in following the socialization in the sub-district. These problems are exacerbated by the absence of a regional regulation that can be used as a reference by the Department of Environment and Land in Sitaro Regency regarding waste management.

Keywords: Policy Implementation; Waste management; Department of Environment and Land

PENDAHULUAN

Sampah merupakan akibat adanya aktifitas manusia yang juga konsekuensi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah terutama perkotaan. Artinya, kemajuan dan perkembangan serta pertambahan penduduk otomatis akan diikuti dengan peningkatan volume sampah.

Di Kabupaten Sitaro fakta empirik menunjukkan, jumlah penduduk serta aktifitas masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat pula. Hal tersebut mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah. Sementara manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini, tidak lebih dari sekedar memindahkan masalah. Artinya, sampah dari satu tempat diangkut ke tempat lain. Itupun, pengelolaannya cukup *open dumping* (buang dorong) serta tidak memenuhi standar memadai. Akibatnya, timbul berbagai masalah, antara lain pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang bermukim disekitar lokasi TPA.

Sampah sebagai material sisa aktivitas manusia seringkali menjadi penyebab timbulnya masalah manakala tidak mendapat pengelolaan secara pantas. Timbulnya masalah longsor dan ledakan metan di TPA, masalah kurangnya anggaran (APBD) investasi bagi pengangkutan dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan (TPA) serta berkembangnya penyakit karena rendahnya sanitasi lingkungan adalah beberapa masalah dari sekian banyak kerugian akibat salah kelola sampah.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Sumber sampah berkaitan dengan tata guna lahan, seperti daerah perumahan, perkantoran, kawasan komersial, dan lain-lain.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro khususnya di Daerah Siau diarahkan dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat. Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Daerah Siau masih jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah di daerah Siau. Berbagai permasalahan yang ada, antara lain:

1. Biaya operasional yang tinggi sedangkan kemampuan pendanaan terbatas.
2. Kuantitas dan kualitas personil, sehingga tidak sepenuhnya pekerjaan penanganan tertangani secara optimal.
3. Masih kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah ke TPS, seperti tidak tepat waktu, tepat cara dan tepat tempat-tempatnya. Keadaan seperti ini menyebabkan sampah di TPS, selalu penuh bahkan berserakan keluar
4. Kurangnya sarana mobilitas pengangkutan sampah.
5. Untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan tersebut diperlukan suatu antisipasi dengan penanganan sampah yang efisien dan efektif, melalui daur ulang dan composting untuk jenis sampah organik atau anorganik.

6. Sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah dikawasan pusat kota saja.

Bidang persampahan merupakan bidang yang secara prinsip dapat membiayai dirinya sendiri, namun demikian dana yang dikumpulkan dari retribusi khususnya di daerah Siau masih minim dan belum mampu untuk membiayai operasi pengelolaan. Rendahnya masukan dan retribusi sampah, di sebabkan mekanisme pemungutannya yang belum memperhatikan faktor kemudahan pelaksanaan, efisiensi, dan pengendalian kebocoran.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan kontribusinya sangat besar. Keikutsertaan masyarakat dapat mempercepat penanganan masalah persampahan di daerah Siau. Salah satunya upaya pemerintah kabupaten dalam mendorong partisipasi masyarakat aktif adalah dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pendataan mengenai kebersihan khususnya untuk lokasi-lokasi pada jalan-jalan protokol, daerah pertokoan, terminal-terminal, pelabuhan, stadion.

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian implementasi kebijakan

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk.,1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *implementation = f (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = f (Policy, Formator, Implementor, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48). (Sumber: <http://www.google.co.id/search>. Diakses pada tanggal 18 juli 2020)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

• Pengelolaan Sampah

Neolaka(2008),jakarta:Rineka Cipta berpendapat bahwa penegelolaan sampah merupakan upayah menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengolaan pemerintah secara Bersama-sama. Sedangkan menurut Alex (2012) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulang atau pembuangan dari material sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang baiknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit. (sumber: Jakarta:rineka.Cipta.)

Menurut Poerwadarminta W.J.S (1991) bahwa pengelolaan sampah adalah pengumpulan pengangkutan, dan pembuangan sampah. Adapun usaha pengelolaan sampah.

Menurut Slamet (1994) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengertidan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnaan sampah. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dan menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat-tempat yang besar dan dikelola dengan baik, sehinggahal-hal yang negative bagi kehidupan kita tidak terjadi.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtosi di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (sreet-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsisten. Perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan pengelolaansampah di kabupaten sitaro bahwa:

“Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja dinas kebersihan dan pertamanan kabupaten baik secara persial (terpisah sendiri-sendiri) maupun secara simultan. Namun demikian, ditemukan hambatan komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas dan tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan.”

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai evektifitas implementasi kebijakan publik. dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok akan sangat berperan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif

(Sugiyono 2008). Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana “Struktur Birokrasi, Sumber daya, Disposisi, Komunikasi Di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Siau. Dengan menggunakan teori George C. Edward III yang memiliki empat indikator dalam menilai implementasi kebijakan yaitu: Struktur Birokrasi, Sumber daya, Disposisi dan Komunikasi. Adapun informan dalam penelitian adalah Kepala Dinas, Pegawai/Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Siau, Pegawai Lokasi/pengatur TPA, Buruh Sampah dan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sitaro

Dengan melihat besarnya jumlah timbunan sampah yang dihasilkan perharinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut. Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Sitaro saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pembatasan jumlah timbunan sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam hal pembatasan tersebut.

Dalam mengurangi jumlah timbunan sampah DLHP mendirikan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang 1TPST yang aktif beroperasi di Siau. Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah adalah dengan metode 3R (*Reduse, Reuse dan Recycle*). Metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah dan sebagai salah satu cara dalam hal pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang ada. Sedangkan untuk metode bank sampah, dinas memberikan bantuan peralatan teknis berupa tong sampah, dan alat timbangan untuk setiap kecamatan. Sedangkan untuk pendaurulangan sampah, pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dalam membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya. Hal tersebut seharusnya juga dijadikan agenda pemerintah untuk pendaurulangan sampah anorganik.

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah seperti kegiatan penggunaan kembali sampah kemasan untuk fungsi yang sama belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak terdapat sampah-sampah kemasan yang ada di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dibantu oleh masyarakat. Dari hasil observasi masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mengumpulkan sampah di TPS dan membuang sampah sembarangan disekitar tempat tinggalnya atau di sungai.

Sistem pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Sitaro adalah dengan menggunakan metode *control landfill* yaitu dengan menimbun sampah dengan lapisan tanah setiap tujuh harinya.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro tentunya mempunyai hambatan atau kendala-kendala dalam hal pelaksanaan implementasinya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sitaro, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan perannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sitaro.

B. Kebijakan Pemerintah Penanganan Sampah

Kebijakan pemerintah untuk pengelolaan sampah diatur dalam SK. Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan itu pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih perlu dilakukannya penataan ulang, bukan hanya melalui penataan dibidang kelembagaan saja tetapi juga perlu suatu manajemen yang baik. Karena selama ini buruknya lingkungan yang terjadi diberbagai daerah perkotaan khususnya pulau Siau adalah manajemen pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga menyebabkan kondisi kebersihan lingkungan kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya dengan mengandalkan dukungan sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas operasional yang memadai. Namun juga perlu kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan lingkungan khususnya mengenai sampah. Untuk itu terkait upaya pemerintah Sitaro untuk terciptanya lingkungan yang bersih, maka telah dikeluarkanlah SK. Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah

Menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang memiliki empat faktor yang dapat mengukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro.

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang ada pada bidang Operasional Dinas lingkungan hidup dan Pertanahan, susunan birokrasi yang ada dalam Dinas lingkungan hidup dan Pertanahan bidang Operasional tidak terlalu panjang dapat memudahkan dalam mengkoordinir petugas kebersihan dari Kasie, staff sampai mandor dan penyapu jalan dalam menjalankan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Siatro Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah. Jumlah timbunan sampah yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kendala-kendala yang ada pada struktur birokrasi saat ini adalah belum adanya bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sumber daya manusia termasuk kualitas dan kuantitasnya. dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada masih kurang dan perlu penambahan jumlah petugas kebersihan agar pelayanan kebersihan dapat berjalan secara optimal. Namun terlepas dari kurangnya sumber daya yang dimiliki, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Sitaro dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai masih kurang. Dari semua sumber daya yang diperlukan, baik dari sumber daya manusia, ataupun sarana dan prasarana memerlukan dana yang cukup besar agar semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bisa tercapai.

c. Disposisi

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni:

- a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;

- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
- c) Komitmen aparat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Komitmen dari petugas lapangan sudah mengetahui tugasnya dengan baik dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, namun didalam prakteknya masih ditemukan beberapa petugas lapangan ataupun pegawai yang dalam menjalankan tugasnya belum optimal, seperti belum sepenuhnya bekerja di saat jam kerja. Dalam menjaga komitmen yang ada saat ini, para petugas lapangan yang melanggar akan dikenakan sanksi bagi yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya seperti kepada para petugas kebersihan yang dalam menjalankan tugasnya didapati kurang rajin dan sering terlambat untuk bekerja mendapat sanksi berupa teguran secara lisan ataupun tertulis. Respon atau tanggapan implementor terhadap suatu kebijakan pengelolaan sampah menentukan keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah. Jumlah timbunan sampah yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kendala-kendala yang ada pada struktur birokrasi saat ini adalah belum adanya bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.

d. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro akan tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro pemerintah daerah menggunakan cara sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan Kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Cara lain yang dilakukan dengan menggunakan media seperti melalui media internet sudah dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang adanya perda tersebut. Namun ketepatan dari penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro yang ditujukan kepada masyarakat tampaknya belum sepenuhnya berhasil, karena menurut hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Kabupaten Sitaro mereka belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan sampah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

PENUTUP

1. Struktur Birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas pertanahan memiliki struktur yang tidak terlalu panjang namun belum sepenuhnya efektif. Karena masing terdapat kekurangan mengenai bagian-bagian khusus dalam kegiatan pengurangan dan penanganan serta dalam pengawasan bagi yang sehingga implementasi pengelolaan sampah kurang optimal.
2. Sumber Daya yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro seperti sumber daya manusia yang ada juga dirasa belum cukup untuk melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan juga sumber daya lain yang dibutuhkan berupa sarana dan prasarana penunjang kebersihan dalam hal pengangkutan dan pengolahan sampah juga perlu adanya penambahan untuk mendukung berhasilnya implementasi kebijakan sampah di Kabupaten Sitaro.
3. Disposisi yang ada saat ini terkait dengan komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan dapat dikatakan cukup bagus, namun dalam prakteknya masih terdapat petugas-petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

4. Komunikasi .dalam penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal.hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang insentif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan.
5. Tidak ada peraturan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriaja, H. 2004. **Memproses Sampah**. Jakarta Penebar Swadaya.
- Agustino, Leo. 2006, **Politik & Kebijakan Publik**, AIPI Bandung: Bandung.
- Alex, S. 2012. **Sukses Mengolah Sampah Organic Menjadi Pupuk Organik**. Yogyakarta: PustakaBaru Press.
- Edward III, George C, 1978. **Understanding Publik Policy**. Prantice Hall: NewJersey.
- Grindle,S. Merilee. (1980: 7). **Politicis, Policy Implementation in the Thirld World**. Princeton University Press. New Jersey.i
- Neoloka, A. 2008.**Kesadaran Lingkungan**.Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons. 2008. **Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan/Wayne Parsons**.Jakarta :Kencana
- Poerwadarminta W.J.S. (1991). **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Soewadi Hadiwiyoto, S. 1983. **Penampungan dan Pemanfaatan Sampah**.Jakarta: Yayasan Indayu.
- Slamet, J.S 1994. **KesehatanLingkungan**.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono Budi 2008.**Metode Penelitian Kualitataif**.Alfabeta; Bandung.
- Tachjan, 2006, **Implementasi Kebijakan Publik**.Lemlit Unpad; Bandung kebijakan Kencana: Jakarta
- Wibawa, Samodra, dkk., 1994, **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada n
- Winarno, Budi. 2005. **Teori & Proses Kebijakan Publik**. Media Pressindo: Yogyakarta.

Sumber Lain :

- Lane, Policy Implementation In Poor Countries, Umea University, Sweden,
<http://www.google.co.id/search>. Diakses pada tanggal 18 juli 2020
<http://id.com./social-sciences/economics/211686-insetif-dibagi-menjadi-duamacam/#ixzzItTbF2msT>.
- <https://ayodarling.wordpress.com/2013/04/07/pengelolaan-sampah>
 Peraturan daerah Tentang Retribusi Sampah No. 7 Tahun 2011
 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
 Undang-undang No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 SkBupati No 10 Tahun 2020 tentangPengelolaanSampah